



# BUPATI PATI

## PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR : 5 TAHUN 2008

### TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
UNTUK PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu disediakan uang persediaan awal tahun sebagai uang muka kerja dan penggantian uang persediaan atas pertanggungjawaban uang persediaan;
  - b. bahwa untuk mengatur ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran, perlu diberi batas penyediaan uang persediaan dan penggantian uang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Batas jumlah uang persediaan yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran masing-masing belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah dikurangi belanja untuk tenaga kontrak dan belanja modal.

Pasal 3

Jumlah uang persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Jumlah uang penggantian uang persediaan diberikan sejumlah pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di P a t i  
pada tanggal 22 Maret 2008

BUPATI PATI,

  
TASIMAN

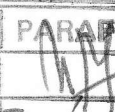





Diundangkan di Pati

pada tanggal 22 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

  
SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR...21

| PENELITIAN<br>PERDA / KEPUTUSAN BUPATI |   |
|--|---|
| JABATAN                                | PARAF   |
| W/ BIL BUPATI                          |  |
| SEKDA                                  |  |
| ASISTEN                                |  |
| KABUPATEN                              |  |
| KABUPATEN                              |  |
| PERUBAHAN                              |  |

888  
3.4

BATAS UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK PENGAJUAN  
 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008

| Kode |    | SKPD  | Jumlah         |
|------|----|---|----------------|
| 1    |    | 2   | 3              |
| I    |    | URUSAN WAJIB                                | 26.761.035.000 |
| 1 01 |    | Pendidikan                                  | 4.903.967.000  |
| 1 01 | 01 | Dinas Pendidikan                            | 4.903.967.000  |
| 1 02 |    | Kesehatan                                   | 4.781.330.000  |
| 1 02 | 01 | Dinas Kesehatan                             | 2.046.607.000  |
| 1 02 | 02 | BRSD "RAA Soewondo"                         | 2.734.723.000  |
| 1 03 |    | Pekerjaan Umum                              | 6.075.439.000  |
| 1 03 | 01 | Diskimpras                                  | 6.075.439.000  |
| 1 06 |    | Perencanaan Pembangunan                     | 884.021.000    |
| 1 06 | 01 | BAPPEDA                                     | 884.021.000    |
| 1 07 |    | Perhubungan                                 | 220.414.000    |
| 1 07 | 01 | Dinas Perhubungan dan Pariwisata            | 220.414.000    |
| 1 08 |    | Lingkungan Hidup                            | 113.349.000    |
| 1 08 | 01 | Kantor Pedalda                              | 113.349.000    |
| 1 09 |    | Pertanahan                                  | 98.674.000     |
| 1 09 | 01 | Dinas Pertanahan                            | 98.674.000     |
| 1 10 |    | Kependudukan dan Catatan Sipil              | 273.703.000    |
| 1 10 | 01 | Kanduk Capil                                | 273.703.000    |
| 1 12 |    | KBKS  | 153.149.000    |
| 1 12 | 01 | Dinas KBKS                                  | 153.149.000    |
| 1 14 |    | Tenaga Kerja                                | 293.036.000    |
| 1 14 | 01 | Disnakertrans                               | 293.036.000    |
| 1 15 |    | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah           | 99.992.000     |
| 1 15 | 01 | Kantor Koperasi                             | 99.992.000     |
| 1 19 |    | Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Dalam Negeri | 441.401.000    |
| 1 19 | 01 | Kantor Kesbang Linmas                       | 139.158.000    |
| 1 01 | 02 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja           | 302.243.000    |
| 1 20 |    | Pemerintahan Umum                           | 7.220.984.000  |
| 1 20 | 01 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah              | -              |
| 1 20 | 02 | Bupati dan Wakil Bupati                     | -              |
| 1 20 | 03 | Sekretariat Daerah                          | 2.933.787.000  |
| 1 20 | 04 | Sekretariat DPRD                            | 2.870.474.000  |
| 1 20 | 06 | Kantor Penelitian dan Pengembangan          | 34.344.000     |
| 1 20 | 07 | Badan Pengawas Daerah                       | 236.913.000    |
| 1 20 | 08 | Kantor Pendapatan Daerah                    | 518.285.000    |

| Kode       |                                     | SKPD           | Jumlah |
|------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| 1          | 2                                   | 3              |        |
| 1 20 10 01 | Kecamatan Pati                      | 31.568.000     |        |
| 1 20 11 02 | Kecamatan Margorejo                 | 21.814.000     |        |
| 1 20 12 03 | Kecamatan Tlogowungu                | 23.644.000     |        |
| 1 20 13 04 | Kecamatan Gembong                   | 17.939.000     |        |
| 1 20 14 05 | Kecamatan Tayu                      | 24.081.000     |        |
| 1 20 15 06 | Kecamatan Margoyoso                 | 22.742.000     |        |
| 1 20 16 07 | Kecamatan Gunung Wungkal            | 19.812.000     |        |
| 1 20 17 08 | Kecamatan Cluwak                    | 19.906.000     |        |
| 1 20 18 09 | Kecamatan Dukuhseti                 | 19.951.000     |        |
| 1 20 19 10 | Kecamatan Kayen                     | 22.342.000     |        |
| 1 20 20 11 | Kecamatan Gabus                     | 25.271.000     |        |
| 1 20 21 12 | Kecamatan Tambakromo                | 19.559.000     |        |
| 1 20 22 13 | Kecamatan Skolilo                   | 23.249.000     |        |
| 1 20 23 14 | Kecamatan Juwana                    | 28.727.000     |        |
| 1 20 24 15 | Kecamatan Trangkil                  | 21.486.000     |        |
| 1 20 25 16 | Kecamatan Wedarijaksa               | 24.891.000     |        |
| 1 20 26 17 | Kecamatan Batangan                  | 24.517.000     |        |
| 1 20 27 18 | Kecamatan Jakenan                   | 21.811.000     |        |
| 1 20 28 19 | Kecamatan Jaken                     | 22.935.000     |        |
| 1 20 29 20 | Kecamatan Winong                    | 27.616.000     |        |
| 1 20 30 21 | Kecamatan Pucakwangi                | 21.671.000     |        |
| 1 20 31 01 | Kelurahan Pati Wetan                | 7.898.000      |        |
| 1 20 32 02 | Kelurahan Pati Kidul                | 10.011.000     |        |
| 1 20 33 03 | Kelurahan Pati Lor                  | 10.750.000     |        |
| 1 20 34 04 | Kelurahan Parenggan                 | 6.904.000      |        |
| 1 20 35 05 | Kelurahan Kalidoro                  | 7.933.000      |        |
| 1 21       | Kepegawaian                         | 673.001.000    |        |
| 1 21 01    | Badan Kepegawaian Daerah            | 673.001.000    |        |
| 1 22       | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    | 472.251.000    |        |
| 1 22 01    | Diskesospermas                      | 472.251.000    |        |
| 1 24       | Kearsipan                           | 56.324.000     |        |
| 1 24 01    | Kantor Arsip Daerah                 | 56.324.000     |        |
| 2          | URUSAN PILIHAN                      | 1.970.159.000  |        |
| 2 01       | Pertanian                           | 607.843.000    |        |
| 2 01 01    | Dinas Pertanian dan Peternakan      | 607.843.000    |        |
| 2 02       | Kehutanan                           | 675.500.000    |        |
| 2 02 01    | Dinas Kehutanan dan Perkebunan      | 675.500.000    |        |
| 2 05       | Kelautan dan Perikanan              | 213.854.000    |        |
| 2 05 01    | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 213.854.000    |        |
| 2 06       | Perdagangan                         | 241.278.000    |        |
| 2 06 01    | Kantor Pengendalian Perdagangan     | 241.278.000    |        |
| 2 07       | Perindustrian                       | 231.684.000    |        |
| 2 07 01    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 231.684.000    |        |
|            | Jumlah :                            | 28.731.194.000 |        |

**PENELITIAN**  
**PERDA / KEPUTUSAN BUPATI**

JABATAN \_\_\_\_\_ PARAF \_\_\_\_\_

SEKDA AD. KEU

BUPATI, PATI,